

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Fenomena kesehatan global, kini tidak lagi menjadi permasalahan yang baru. Rentannya kondisi kesehatan manusia dalam suatu negara, menjadikan negara harus mensinergikan kebijakan politik negara dengan kebijakan kesehatan tingkat global. Merujuk pada isu kesehatan global, pada dasarnya permasalahan kesehatan global menjadi perihai yang sangat menentukan kualitas suatu negara terhadap pembangunan nasional. Untuk itu, meningkatnya kerentanan manusia terhadap berbagai penyakit, menjadi bagian penting dari pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan konsep *Human Security* atau keamanan manusia tentang bagaimana suatu negara memberlakukan suatu kebijakan untuk menjamin hak warga negaranya.

Pada akhir bulan Desember 2019, munculnya varian penyakit baru yang memiliki kemiripan gejala pernapasan akut *Respiratory Syndrome* (SARS) dan *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) telah dilaporkan di Wuhan, Hubei, China. Kluster pertama kali terdeteksi di Pasar Grosir makanan laut, Wuhan dengan 41 kasus awal Pneumonia berat. Setelah 2 minggu dinyatakan adanya varian penyakit baru Pneumonia berat di luar China, virus ini semakin merebak dan tersebar di seluruh dunia hingga 13 kali lipat lebih banyak daripada China sendiri. Pada 30 Januari 2020, Direktur Jenderal *World Health Organization* (WHO) Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus menyatakan bahwa Novel Coronavirus atau virus yang menyebabkan Covid-19 adalah virus yang mudah menular melalui sistem pernapasan yakni wabah SARS-CoV-2 dan telah menjadi krisis kesehatan global termasuk Selandia Baru (Domenico & Maurizo, 2020).

Kemudian, menurut WHO terkait negara-negara yang terkena dampak awal di masa pandemi, sekitar 40% kasus mengalami penyakit ringan, 40% mengalami penyakit sedang termasuk pneumonia, 15% kasus mengalami penyakit berat, dan

5% kasus mengalami penyakit kritis. Seperti halnya di Selandia Baru, salah satu negara yang terletak di kawasan Pasifik Selatan dan memiliki 5,084 juta penduduk juga berusaha untuk memerangi pandemi Covid-19. Kasus Covid-19 di Selandia Baru pertama kali muncul pada 28 Februari 2020 tepatnya di Auckland mendapati satu kasus pasien yang terkena Covid-19. Hal tersebut dikarenakan pasien telah melakukan penerbangan dari Tehran, Iran dan transit melalui Bali, Indonesia menuju ke Auckland pada 26 Februari 2020 (Tutukansa, 2021).

Semakin meningkatnya laju penularan Covid-19, meningkatnya angka kasus terkonfirmasi Covid-19 di Selandia Baru sebanyak 1.500 orang dan 20 orang meninggal dunia menjadikan negara ini harus memikirkan kebijakan yang tepat untuk menghapus pandemi Covid-19 secara menyeluruh. WHO pun meminta pada negara-negara di dunia termasuk Selandia Baru untuk segera mengambil berbagai tindakan kebijakan untuk memperlambat laju infeksi baru. Dengan adanya respon WHO tersebut, pemerintah Selandia Baru David Clark, selaku Menteri Kesehatan bergegas meresponnya dengan menutup berbagai akses perjalanan dari luar negara seperti akses Iran menuju Selandia Baru untuk menekan laju persebaran Covid-19 (CNN, 2021).

Meskipun WHO telah bekerja sama dengan pemerintah nasional untuk mengkoordinasikan percepatan penanggulangan Covid-19, nyatanya pandemi ini berkembang menjadi varian penyakit baru yang tumbuh pada tingkat eksponensial dan belum ditemukan vaksin atau terapi yang terbukti untuk mengobati maupun mencegahnya. Untuk itu, sementara waktu WHO menganjurkan kepada negara-negara untuk membatasi mobilitasi masyarakat dengan melakukan penguncian wilayah atau “Lockdown”. Akan tetapi, pengambilan kebijakan tersebut menuai kesenjangan bagi kehidupan sosial ekonomi individu, komunitas, maupun masyarakat seperti munculnya banyak pengangguran dan penurunan kualitas hidup pada suatu negara karena terbatasnya aktivitas sosial ekonomi (World Report, 2020).

Dalam upaya meminimalisasi tingkat kesenjangan, negara-negara pun mulai

memperkenalkan transisi pembatasan seperti langkah-langkah untuk membatasi risiko penyebaran virus secara berkala. Dengan berbagai upaya untuk memperlambat transmisi global, WHO menghimbau negara-negara untuk segera melakukan pemantauan aktif pada tingkat mobilisasi masyarakat hingga aspek kesehatan masyarakat untuk mendiagnosis dengan cepat penyebaran Covid-19 (WHO, 2020).

Dengan berbagai risiko krisis global dan penerapan kebijakan yang dipaparkan oleh WHO dalam menangani Covid-19, pada faktanya negara mana pun dapat menerapkan kebijakan pengendalian Covid-19 sesuai dengan kondisi negara. Seperti halnya di Selandia Baru, secara keseluruhan telah mengadopsi pendekatan proaktif dan mengimplementasikan kebijakan yang ketat sejak dini. Jacinda Ardern selaku Perdana Menteri Selandia Baru, dengan cepat mengambil keputusan dalam mengendalikan Covid-19 untuk menekan laju penyebaran pandemi Covid-19 (Nhamo & Sibanda, 2020).

Lain dari Selandia Baru yang berusaha menghilangkan kasus Covid-19 hingga nol kasus, jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya berdasarkan letak wilayah Pasifik, pun diketahui pada negara Australia justru memilih untuk berdamaian dengan pandemi Covid-19. Australia menganggap bahwa Covid-19 adalah suatu pandemi yang tidak akan hilang dan memaksa untuk hidup berdampingan dengan Covid-19. Keputusan Australia itu pun sama halnya yang dilakukan oleh negara-negara wilayah Eropa dan Asia seperti Inggris dan Singapura bahwasannya menganggap Covid-19 tidak dapat digilangkan dan menuntut untuk hidup bersampingan dengan pandemi. Walaupun demikian, Australia juga tetap menerapkan protokol kesehatan dengan melakukan vaksinasi Covid-19 dan tetap memastikan warga Australia tetap terlindungi dari Covid-19 disamping kegiatan perbaikan ekonomi. Australia pun juga memutuskan untuk memperpanjang penguncian wilayah di Melbourne selama tiga pekan, begitu pula yang dilakukan negara lain di dunia. Penguncian wilayah dan penerapan vaksinasi pun tetap dijalankan oleh negara-negara di dunia akan tetapi tidak seketat yang dilakukan di Selandia Baru. Mengingat populasi manusia di Selandia Baru yang

cukup sedikit dibandingkan negara lain dan juga tingkat kebijakan Selandia Baru dalam menerapkan kebijakan Covid-19 (Pramadiba, 2021).

Jika dibandingkan cara penanganan Covid-19 di negara lain seperti Australia, Singapura, dan Inggris, Selandia Baru masih tetap melakukan kebijakan eliminasi Covid-19 yang berfokus pada pemberantasan rantai transmisi baru dari mobilitas penduduk yang diuraikan menjadi pembatasan jarak, etika batuk dan bersin, kebersihan tangan, pengendalian infeksi dan kontrol kesehatan, isolasi dan karantina yang terbukti berhasil dalam menangani Covid-19. Menindaklanjuti kebijakan eliminasi Covid-19, Selandia Baru kemudian menerapkan kebijakan dengan menutup keseluruhan akses keluar masuk Selandia Baru dengan melakukan “Lockdown” atau penguncian wilayah pada akhir Maret 2020. Tindakan Perdana Menteri Selandia Baru itu pun menjadi salah satu kebijakan terketat di dunia untuk menekan laju Covid-19 dengan cara meratakan kurva kasus positif Covid-19. Respon cepat ini kian menuai banyak pujian dari negara lain dikarenakan kesiapsiagaan Selandia Baru dalam mengendalikan kasus penyebaran Covid-19 (Uchoa, 2020).

Lebih lanjut, sebelum penerapan penguncian wilayah, Selandia Baru juga melaksanakan beberapa tahapan eliminasi non-farmasi yakni (1) persiapan, (2) pengurangan, (3) pembatasan, (4) *lockdown* atau penguncian wilayah sebagai upaya untuk mengurangi penyebaran Covid-19. Keempat tahapan diterapkan Selandia Baru yang dimulai dari level 2 dan pada 25 Maret 2020 naik pada level 4 dengan melakukan penguncian wilayah tingkat nasional. Dalam menerapkan kebijakan eliminasi untuk menanggapi pandemi Covid-19, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengumumkan hal tersebut pada 26 Agustus 2020. Selandia Baru mulai melakukan penguncian wilayah dengan menggunakan pendekatan mitigasi untuk mengelola pandemi Covid-19 yang mengacu pada pengurangan penyebaran virus hingga menjadi 0 kasus (Baker, 2020). Sehingga, dari serangkaian tahapan tersebut, penguncian wilayah dinilai efektif untuk mengurangi laju pandemi dengan membuahkan hasil seperti menurunnya angka kasus Covid-19 bahkan mencapai “0” kasus dan pada 08 Juni 2020 Jacinda

Ardern mencabut keseluruhan kebijakan penguncian wilayah termasuk mobilisasi domestik (Detik News, 2020).

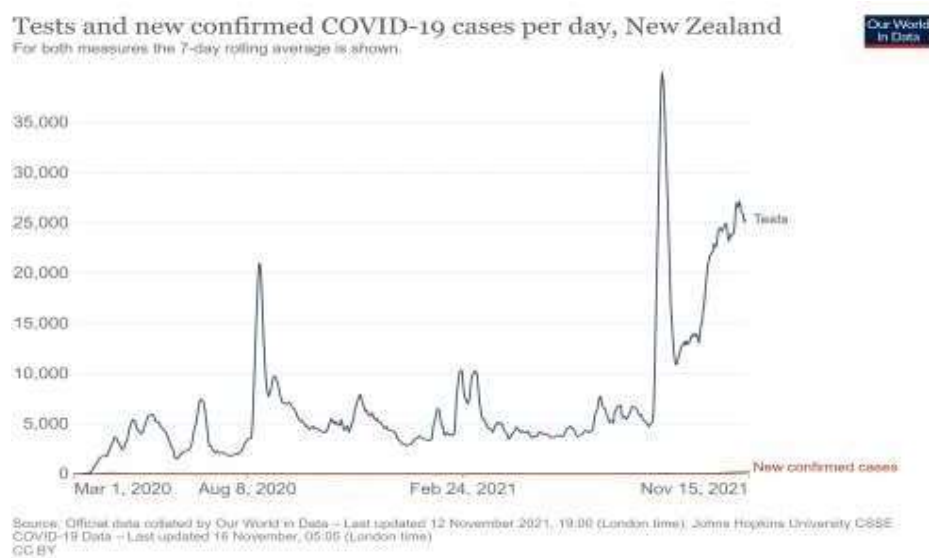
Hal tersebut pun juga dilansir dalam lama berita online CNN Indonesia (2021) bahwasannya negara Selandia baru menjadi negara teratas dalam menangani Covid-19 diantara negara Taiwan dan juga Vietnam. Lowly Institute pun menegaskan bahwa negara yang memiliki kapasitas jumlah penduduk di bawah 10 juta orang, penerapan kebijakan yang ketat, dan kekompakan masyarakat pun akan menjadi nilai keunggulan tersendiri dalam menangani Covid-19 di negara kecil seperti Selandia Baru. Penelitian tersebut pun membuktikan bahwa negara-negara di Pasifik lebih mampu untuk menangani Covid-19 dengan cepat dibandingkan negara Eropa seperti Amerika Serikat.

Setelah sekian waktu Selandia Baru mencabut kebijakan penguncian wilayah, pada 17 Agustus 2021 Selandia Baru kembali menerapkan kebijakan penguncian wilayah disertai dengan mewajibkan vaksinasi Covid-19 bagi seluruh masyarakat Selandia Baru. Hal ini dikarenakan terdeteksinya kasus Covid-19 baru yakni varian Delta di Auckland dan Coromandel. Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pun segera mengambil tindakan dengan mengharuskan penerapan kembali penguncian wilayah secara ketat untuk menekan laju penyebaran Covid-19 varian Delta (CNN, 2021).

Meskipun kebijakan eliminasi Covid-19 sudah diterapkan, tidak dapat dipungkiri bahwa patogen virus Covid-19 semakin berkembang dan dibutuhkan pula peningkatan ketahanan tubuh. Dengan demikian, pencegahan penyebaran pandemi Covid-19 tidak cukup berhenti pada penerapan kebijakan eliminasi. Per bulan Agustus 2021, Selandia Baru tengah berusaha kembali menangani pandemi Covid-19 dengan varian Delta dan varian Omicron per bulan November 2021. Pandemi Covid-19 varian Delta dan varian Omicron merupakan mutasi Covid-19 yang diketahui lebih mudah dan cepat menular daripada varian virus Covid-19. Sejauh penelitian yang telah dilakukan oleh WHO, pemberian vaksinasi Covid-19 dianggap sebagai solusi untuk menekan laju Covid-19. Dalam hal ini, Perdana

Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern terus berusaha untuk menerapkan kebijakan eliminasi dengan melakukan vaksinasi Covid-19 (M2 Pharma, 2021).

Gambar 1



Sumber: Our World in Data (2021)

Seperti halnya gambar 1 diatas, Selandia Baru mengalami peningkatan kasus Covid-19 secara drastis yang di sebabkan oleh beberapa hal salah satunya adalah kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Selandia Baru seperti ketidakoptimalan penggunaan pengembangan data. Bahwasannya data besar geospasial sangat penting keberadaannya untuk menyediakan informasi persebaran Covid-19 berikut dengan peta penguncian wilayah. Seperti kesalahan Kementerian Kesehatan saat terjadi gangguan komunikasi yang menyebabkan sebanyak 700.000 orang Auckland Barat dan Selatan mendapatkan kesalahan informasi. Dalam hal ini, Kementerian Kesehatan memberikan himbauan yang berbunyi “If you’re in South or West Auckland, or if you have a greater risk of poor health outcomes if you were to get Covid-19, even if you don’t have symptoms, please have a test”. Hal tersebut kemudian mengakibatkan stasiun pengujian dibanjiri oleh warga yang menuntut diberikan pengujian Covid-19, meskipun tidak

memiliki gejala. Berita tersebut diterbitkan di laman Facebook resmi milik Kementerian Kesehatan dan selang tiga hari kemudian berita tersebut dihapus. Pada kegiatan tersebut pun menyebabkan banyaknya warga yang berkerumun untuk segera mendapatkan hasil pengujian, namun hal tersebut menjadi salah satu penyebab naiknya kembali angka positif Covid-19 di Selandia Baru (NZ Herald, 2020).

Di tengah banyak peningkatan kasus Covid-19, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern terus melakukan tanggap Covid-19 dengan menargetkan vaksinasi sebanyak 90% dari warga negaranya sebagai solusi untuk mengakhiri penguncian wilayah. Sementara itu, Selandia Baru masih mencapai 46% vaksinasi dari keseluruhan warga negaranya. Selain kebijakan tersebut, per 1 November Selandia Baru juga menerapkan syarat vaksinasi bagi bukan warga negara Selandia Baru, hal ini tidak lain bertujuan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 varian Delta (Wright, 2021). Sehingga, kebijakan eliminasi Covid-19 yang diterapkan oleh Selandia Baru dianggap sebagai kebijakan yang tepat untuk menangani Covid-19.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dirumuskan permasalahan yang akan dijawab dalam skripsi ini sebagai berikut: kebijakan apa yang diterapkan oleh Perdana Menteri Jacinda Ardern sehingga Selandia Baru berhasil menjadi salah satu negara terbaik dalam menangani Covid-19 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Secara umum, skripsi ini memiliki dua tujuan. Pertama, untuk mengetahui kebijakan apa yang diterapkan Selandia Baru dalam menangani Covid-19. Kedua, untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi Selandia Baru dalam mengendalikan Covid-19. Sehingga, penanganan kasus tersebut berhasil dengan cepat dan efektif.

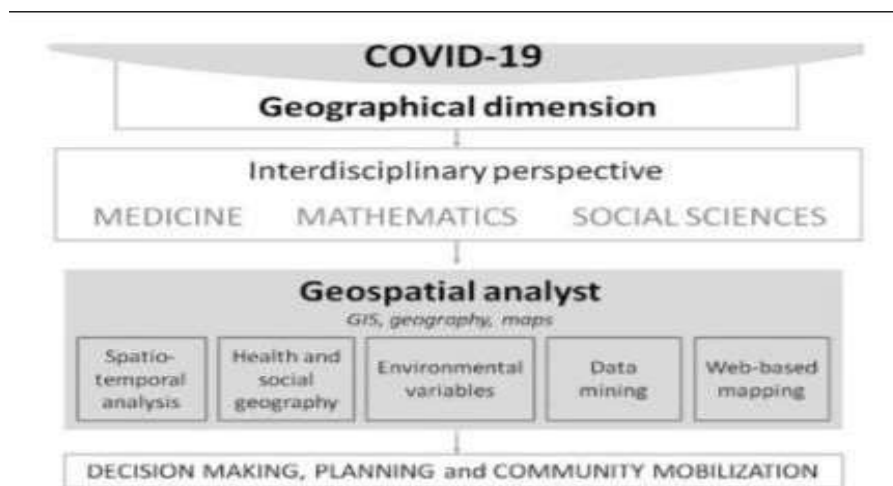
1.4. Kerangka Pemikiran

1.4.1. Analisis Geospasial Covid-19

Semakin kompleksnya fenomena dinamika hubungan internasional dengan meningkatnya tantangan globalisasi, menjadikan fenomena perbatasan geografis negara menjadi kabur dan disertai dengan berbagai ancaman perbatasan globalisasi geopolitik negara. Kemudian, munculnya teori geopolitik, kini dapat menjadi alat analitis terhadap praktik-praktik representasi yang inheren terhadap kebijakan luar negeri, politik internasional, serta interaksi *geographic locale* yang terjadi. Geopolitik memahami tempat melalui kerangka *location*, *locale*, dan *sense of place* yang mencakup keunikan kewilayahan yang ada bersama pemahaman ruang mengenai konfigurasi relasi kuasa dan *push and pull* yang ada dalam suatu ruang. Struktur geopolitik, terbentuk dari interaksi kekuatan geografis dan politik yang saling berkaitan sesuai dengan kondisi negara. Dalam membangun kesatuan geopolitik suatu negara, sejatinya struktur geopolitik terdiri dari pola, bentuk, ukuran, dan wujud fisik geografis dan didalamnya terdapat jaringan yang mengikat (Cohen, 2015).

Sejak ditetapkannya oleh WHO bahwa Coronavirus 2019 atau Covid-19 menjadi pandemi global, menjadikan berbagai disiplin ilmu memiliki fokus pada dimensi geografis persebaran penyakit. Aspek tematik Covid-19 memerlukan analisa pendekatan interdisipliner geografi untuk menawarkan sintesis untuk interaksi antara variabel biofisik dan manusia. Dalam hal ini, analisis geospasial menjadi sebuah pendekatan lingkungan dari perspektif holistik berfokus pada proses ruang geografis suatu negara. Lebih lanjut, analisis geospasial juga memiliki fokus pada penerapan konsep geografi medis untuk mengatasi masalah kesehatan kependudukan pada spasial penyakit beserta obatnya seperti pandemi Covid-19 (Ivan et.al, 2020). Seperti bagan di bawah ini, bahwa analisis geospasial mencakup pada bagaimana negara mampu mengelaborasi dimensi geografi dalam menangani persebaran pandemi Covid-19.

Gambar 2



Sumber: Ivan et.al (2020)

Dari gambar 2 diatas, diketahui bahwa berkembangnya pandemi Covid-19 yang semakin mengglobal, analisis geospasial berguna untuk menganalisis statistik spasial geografi pada persebaran krisis kesehatan yakni pandemi Covid-19. Dimensi analisa geografi Covid-19 merupakan gabungan dari disiplin ilmu kesehatan, matematika, dalam ilmu sosial yang kemudian menjadi suatu analisa geospasial. Analisis ini menjadi satu tema tersendiri untuk mengidentifikasi pemetaan penyakit seperti analisis spatiotemporal, kesehatan dan sosial geografi, variabel lingkungan, analisa data, dan pemetaan berbasis web dalam membantu pengambilan kebijakan suatu negara. Analisa geospasial ini juga menyoroti interaksi aktor negara yakni pemerintah terhadap masyarakat yang terkena dampak dari pandemi Covid-19. Analisis ini mengupayakan korelasi interdisipliner intervensi kebijakan kesehatan untuk menempatkan layanan dan kontrol kesehatan yang tepat dalam memproyeksikan difusi letak spasial dan tren temporal suatu negara dalam menghadapi pandemi Covid-19 (Ivan et.al, 2020).

Untuk mendapatkan basis data geospasial yang faktual, Ivan et.al (2020) membagi analisis geospasial menjadi lima kelompok analisa kajian. Pertama, analisis spatiotemporal yang berusaha memetakan varian penyakit dan mengacu pada studi pola perkembangan fenomena Covid-19. Salah satu sifat epidemi yang paling penting adalah penyebaran spasial yang bergantung pada tingkat mobilisasi

manusia pada suatu negara. Kemudian, dengan adanya statistik spasial, penerapan kebijakan pengendalian pun diperlukan untuk mengurangi persebaran epidemi. Dalam hal ini, ketika pertama kali diketahui Covid-19 berasal dari China dan pandemi semakin tersebar di seluruh dunia salah satunya di Selandia Baru, pun pemerintah Selandia Baru segera bertindak mengambil kebijakan dengan melakukan penguncian wilayah untuk menekan laju persebaran Covid-19 dari negara lain.

Kedua, geografi kesehatan, analisa ini berupaya membangun pengendalian kesehatan dengan mengukur indeks faktor risiko kebijakan dengan tingkat kesenjangan sosial. Geografi kesehatan mengkonsepsikan sebuah negara mampu menyediakan dan menjamin masyarakatnya untuk mendapatkan layanan kesehatan dan kualitas hidup sehat meskipun sedang dilakukan penguncian wilayah (Ivan et.al, 2020). Dalam analisis ini, pemerintah Selandia Baru telah melakukan jaminan kesehatan masyarakatnya dengan melakukan konsolidasi sistem jaminan kesehatan ke dalam layanan nasional yang terbagi menjadi 20 dewan distrik kesehatan. Distrik ini disatukan menjadi satu lembaga kesehatan atau Badan Kesehatan Selandia Baru yang berfokus untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sejak awal tanpa melakukan rawat inap di rumah sakit (Lintar, 2021).

Ketiga, variabel lingkungan, analisis ini menggunakan korelasi lingkungan, geografi, dan sosial ekonomi untuk mengidentifikasi letak kebijaksanaan suatu negara pada setiap jarak negara pada garis lintang, kepadatan penduduk, tingkat polusi udara, variabel iklim, dan karakteristik spasial temporal infeksi Covid-19 (Ivan et.al, 2020). Dalam hal ini, diketahui bahwa Selandia Baru terletak di wilayah yang cukup jauh dari jangkauan mobilisasi negara lain di dunia, membuat tingkat wilayah geopolitik di Selandia Baru dianggap kebijakans yakni terletak di antara 29° LS sampai 53° LS, dan 165° BT sampai 176° BT dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup rendah. Dengan letak geografis Selandia Baru tersebut, menjadikan Selandia Baru jauh dari berbagai interaksi dunia seperti minimnya angka persebaran penularan Covid-19. Letak geografis tersebut pun

dapat menguntungkan Selandia Baru dari persebaran Covid-19 dibandingkan dengan negara lain di dunia yang memiliki letak geografis yang memiliki yang jarak berdekatan. Sehingga, hal tersebut memungkinkan Jacinda Ardern menerapkan kebijakan eliminasi sebagai upaya menangani pandemi Covid-19 di Selandia Baru (Oliver & Dalziel, 2021).

Keempat penambangan data, bahwasannya data besar geospasial mengacu pada kumpulan data spasial atas informasi mobilitas manusia dari satu negara ke negara lain. Dalam kasus Covid-19, penyediaan informasi yang cepat, dapat membantu suatu negara untuk meminimalisir epidemi dengan melakukan pencegahan dan pengendalian berupa intervensi kebijakan (Ivan et.al, 2020). Dengan terintegrasinya data persebaran Covid-19 dunia, Selandia Baru yang selama ini dianggap sebagai negara yang cepat dan tanggap dalam mengatasi Covid-19, diketahui bahwa Selandia Baru menggunakan intervensi kebijakan eliminasi untuk memudahkan Selandia Baru dalam mengatasi persebaran Covid-19.

Kelima, pemetaan berbasis web, Ivan et.al (2020) menyebutkan bahwa peta web memiliki peran penting dalam menyediakan informasi penyebaran Covid-19. Sehubungan dengan upaya tersebut, Selandia Baru pun memeta-metakan penguncian wilayah berdasarkan tingkat persebaran pandemi Covid-19. Seperti halnya intervensi kebijakan penguncian wilayah di Auckland, menjadikan Jacinda Ardern mengadopsi respon Covid-19 dengan menahan persebaran varian Delta dan varian Omicron daripada mencoba menghilangkannya, hal ini dikarenakan varian Delta dianggap sulit untuk dihilangkan. Dengan demikian, pemetaan berbasis web tersebut berguna untuk menyediakan sejumlah besar informasi untuk landasan perkiraan jumlah persebaran infeksi maupun pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan letak geografis suatu negara.

Dari pemaparan analisa geospasial diatas, analisis ini berusaha untuk memberikan ruang untuk konsiderasi mendalam bagi fenomena hubungan internasional dan geografi yang seringkali tak terlihat di negara Selandia Baru. Jacinda Ardern selaku aktor negara yang memiliki relasi kuasa atas dinamika geopolitik negara

pun berusaha menerapkan kebijakan eliminasi dan praktik representasi hubungan geopolitik pada letak kebijakans negara dalam menghadapi suatu permasalahan.

1.4.2. Teori Kepemimpinan Era *Society* 5.0

Seiring berkembangnya dinamika globalisasi, munculnya seorang aktor dalam dinamika hubungan internasional sangat penting keberadaannya sebagai upaya mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dalam hubungan internasional, seorang aktor memiliki peran untuk melakukan berbagai interaksi antara satu sama lain mengenai konsep hubungan internasional yang lebih luas. Aktor juga berguna sebagai pengendali atas pengambilan suatu keputusan kebijakan pada dinamika hubungan internasional (Roth, 2010). Pada konteks ini, seorang aktor berperan sebagai pemimpin yangmana setiap perilaku dan kebijakan yang telah diputuskan, akan menjadi suatu langkah besar dalam mencapai kepentingan nasional.

Lebih lanjut, kepemimpinan dapat dimaknai dengan sebuah proses atau tahapan untuk mempengaruhi orang lain baik dalam sebuah organisasi maupun diluar organisasi untuk mencapai kepentingan dalam kondisi tertentu. Proses tersebut merupakan tahapan melalui ajakan persuasif maupun ancaman, otoritas kekuasaan, maupun penghargaan. Jika ditinjau lebih lanjut, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang mengetahui medan kekuatan kapabilitas diri sendiri untuk mengetahui kelemahan musuh dan mengimbangnya dengan membangun kebijakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan (Armstrong, 2012).

Saat ini, dunia sedang menghadapi gelombang besar perubahan seperti perubahan teknologi, ekonomi, dan geo-politik. Setiap perubahan juga membawa peluang. Imajinasi adalah kuncinya membentuk masa depan. Era *Society* 5.0 bukanlah prediksi masa depan, melainkan sebuah konsep yang menunjukkan cernahnya masa depan yang ingin diciptakan. Menurut Smith, pada saat ini pemimpin dihadapkan pada keadaan yang terus berubah, kompleks, dan penuh dengan permasalahan.

Kepemimpinan model *Society 5.0* atau kepemimpinan generasi berikutnya harus memberikan pembaharuan kepemimpinan yang mengintegrasikan dan memperluas empat generasi model kepemimpinan sebelumnya dengan menggabungkan praktik terbaik mereka di masa lalu, menyediakan fleksibilitas yang dibutuhkan di masa kini yang terus berubah budaya, dan memungkinkan pertumbuhan positif melintasi evolusi organisasi yang berkelanjutan untuk memaksimalkan kinerja institusi (Smith, 2016).

Dengan demikian, teori kepemimpinan yang cocok dalam Era *Society 5.0* adalah teori yang dikemukakan oleh Keith L. Smith (2016) yaitu mengenai penguasaan konsep, penyelarasan kompetensi, membangun karakter, dan menciptakan koneksi untuk mencapai suatu kepentingan bersama. Dalam penguasaan konsep, pemimpin harus menguasai faktor kontekstual seperti lingkungan organisasi agar dapat meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan yang informatif dan substantif, serta mampu menguasai kondisi untuk mengendalikan suatu fenomena permasalahan. Selain itu, seorang pemimpin juga perlu menyelaraskan kompetensi untuk memanfaatkan kekuatan atau kapabilitas pribadi ke dalam campuran kontekstual permasalahan dengan mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang tepat.

Seorang pemimpin, juga membutuhkan membangun karakter yang berfokus pada komitmen untuk melanjutkan evolusi sebagai pribadi, untuk menumbuhkan kemampuan dalam berpikir, merasakan, dan bertindak. Terakhir, dalam kaitan menciptakan koneksi, pemimpin akan membawa pengaruhnya pada masyarakat dalam Era *Society 5.0*. Kemampuan-kemampuan *soft skill* tersebut menjadi penting pada era kepemimpinan *Society 5.0*, hal ini dikarenakan jika mengandalkan *technical skill* saja tanpa menggunakan *soft skill*, suatu keputusan atau kebijakan tidak akan berhasil secara maksimal. *Soft skill* seorang pemimpin dapat digunakan untuk membangun hubungan kepercayaan, menciptakan jaringan yang kuat, interaksi yang nyaman, dan akan mendukung inovasi dan kreativitas. Keahlian *soft-skill* yang dimiliki seorang pemimpin dalam menggunakan teknologi juga menjadi penting karena Era *Society 5.0* adalah era kolaborasi

teknologi informasi, dan jika tidak mampu menyesuaikan diri maka kapabilitas seorang pemimpin dianggap gagal dikarenakan ketidakmampuan seorang pemimpin dalam menyelesaikan fenomena permasalahan yang ada (Smith, 2016).

Dari berbagai penjelasan mengenai konsep kepemimpinan di atas, diketahui bahwa Perdana Menteri Jacinda Ardern pun memiliki latar belakang kehidupan yang berasal dari keturunan Maori. Jacinda Ardern dilantik sebagai Perdana Menteri Selandia Baru termuda pada tahun 2017. Meskipun demikian, Jacinda Ardern pun memiliki profesionalitas kepemimpinan yang tinggi seperti pada pola kepemimpinan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern yang mampu menekan angka laju Covid-19 dengan cepat dan signifikan. Pada saat menghadapi situasi pandemi Covid-19 seperti saat ini, tentunya diperlukan seorang pemimpin yang mampu memberikan visi misi arah kebijakan yang tepat dalam menangani pandemi ini. Selama kondisi pandemi Covid-19 berlangsung, Jacinda Ardern telah diberikan penghargaan dengan label "juara dunia penghancur Covid-19" dan mendapat julukan "masterclass in the leadership of crisis" (Wilson, 2020).

Dalam hal ini, Jacinda Ardern dinilai mampu memberikan gambaran kontribusi atau bukti nyata dari model kepemimpinannya dengan merumuskan kebijakan eliminasi Covid-19. Jacinda Ardern juga mampu memberikan pengaruh yang besar pada warga Selandia Baru seperti mendorong keterlibatan masyarakat sosial secara menyeluruh untuk mendukung kebijakan yang telah diterapkannya (Mazey & Richardson, 2020). Sehingga, dapat disimpulkan bahwa seorang pemimpin juga harus bisa membuktikan kapabilitas kualitas dirinya untuk bukti hasil kerja yang sudah tercapai selama menjadi pemimpin, hal ini penting adanya digunakan untuk meningkatkan citra baik diri sendiri maupun institusi yang sudah pernah dibawahinya selama menjadi pemimpin.

1.4.3. Kontribusi Ilmu Pengetahuan dalam Pengambilan Kebijakan Publik

Seiring berkembangnya dinamika hubungan internasional, diperlukannya pengembangan peran penelitian dan ilmu pengetahuan dalam pembuatan suatu

kebijakan negara kini sangat penting keberadaanya. Hal ini dikarenakan, ketika suatu negara mengambil kebijakan berdasarkan penelitian dan ilmu pengetahuan, maka akan terlihat pula kebijakan tersebut terasa jauh lebih konkrit yang berdasarkan pada riset data yang ada sehingga memberikan dampak positif terhadap kualitas kebijakan yang diambil. Head (2010) menegaskan bahwa dalam pengambilan kebijakan berdasarkan penelitian dan ilmu pengetahuan, negara harus memperhatikan aspek-aspek krusial yang ada diantaranya pertama basis penelitian data yang kuat. Kedua, sinkronisasi antara media, intelektual, dan pemerintah. Ketiga, dibutuhkannya bukti penerbitan data yang kuat. Keempat, menghindari gejolak politik dalam negeri. Dari keempat aspek tersebut, pengambilan kebijakan publik berdasarkan penelitian dan ilmu pengetahuan dapat berjalan beriringan dengan basis data yang aktual atas fenomena yang saat maupun akan terjadi.

Penerapan ilmu pengetahuan juga harus bersifat rasional, diperlukannya sebuah konsep pilihan rasional yang menjadi salah satu komponen esensial dalam kebijakan publik dikarenakan adanya aspek universal yang harus diakui oleh banyak orang sebagai hasil kebijakan yang baik. Pengambilan keputusan rasional merupakan suatu proses yang dilakukan seseorang berdasarkan pengetahuan dan informasi yang ada dengan harapan bahwa sesuatu akan terjadi. Sejatinya, dibuatnya kebijakan publik yang berdasarkan justifikasi ilmiah pada dasarnya sudah melalui tahapan prosedur dalam pembuatan kebijakan sebelum resmi ditetapkan untuk mencapai kesesuaian capaian kebijakan. Dalam hal ini, diperlukannya nilai dasar penerapan kebijakan publik yang rasionalitas perlu menekankan beberapa aspek seperti yang disebutkan oleh Alons (2020) bahwa pertama, rasionalisasi pengetahuan: hal ini berarti keseluruhan kebijakan dalam masyarakat berpijak pada ilmu pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan dengan menyeluruh mengenai fenomena yang ada. Tidak hanya kecocokan data saja, akan tetapi juga penerapan kebijakan publik yang tepat dan akurat.

Kedua, nilai otonomi: hal ini berarti berbagai nilai yang bersifat universal dengan

latar belakang manusia yang utuh dan mampu menjadi landasan dalam sebuah tindakan. Sehingga, dalam proses pembuatan kebijakan publik, proses otonomi dilakukan secara terbuka untuk publik dan dibuat melalui proses diskusi atau konsultasi antara pembuat dan pelaksana kebijakan. Ketiga, nilai kesetaraan: hal ini berarti semakin besarnya nilai kesetaraan, semakin besar pula persentase nilai pengetahuan dan otonomi pada negara dalam merumuskan suatu kebijakan. Adanya prosedur tersebut, juga ditegaskan kembali pada teori rasionalitas yang menjelaskan bahwa dalam merumuskan kebijakan, diperlukannya kajian ilmu pengetahuan yang komprehensif mengenai keseluruhan opsi pilihan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mencapai hasil yang maksimal dalam capaian kebijakan (Alons, 2020).

Dari berbagai penjelasan mengenai pentingnya kontribusi ilmu pengetahuan dalam proses pengambilan kebijakan publik, dapat dilihat pada kepercayaan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada penelitian dan ilmu pengetahuan teknologi sebagai wujud kontribusi besar di alam menangani pandemi Covid-19. Selama pandemi berlangsung, Perdana Menteri Jacinda Ardern menaruh penuh kepercayaan penyelesaian pandemi Covid-19 berdasarkan fakta ilmiah yang pada kenyataannya banyak diabaikan oleh para pemimpin negara Barat. Dalam hal ini, Michael Baker seorang profesor Departemen Kesehatan Masyarakat, Universitas Otago menegaskan bahwa Perdana Menteri Jacinda Ardern sangat menghormati dan mengikuti berbagai perkembangan ilmu pengetahuan dengan menerapkan kebijakan eliminasi non-farmasi dan farmasi Covid-19 seperti melakukan penguncian wilayah, membatasi akses pelayanan publik, menutup sekolah-sekolah, tidak berkerumun, memakai masker hingga melakukan vaksinasi Covid-19 sebagai perwujudan penerapan ilmu pengetahuan berupa *exit strategy* (Baker, 2020).

Dengan demikian, dalam proses pengambilan kebijakan yang didasarkan pada fakta ilmiah, pun dapat menghasilkan keakuratan penerapan kebijakan sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan berdasarkan rasionalitas kebijakan. Berbagai upaya rasionalisasi penerapan kebijakan eliminasi non-farmasi dan

farmasi Selandia Baru, pun menghasilkan dampak perubahan kondisi Selandia Baru akan pandemi Covid-19 hingga Selandia Baru berhasil menyandang negara terbaik di dunia dalam memerangi pandemi Covid-19.

1.5. Argumen Penelitian

Dalam merespon pandemi Covid-19, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menerapkan kebijakan eliminasi. Kebijakan ini berhasil mengantarkan Selandia Baru menjadi salah satu negara terbaik dalam menangani Covid-19. Penerapan kebijakan ini didukung dengan beberapa faktor seperti pertama, potensi geopolitik Selandia Baru yang cukup kebijakans untuk menerapkan kebijakan eliminasi non-farmasi seperti penguncian wilayah. Adanya potensi geopolitik yang kebijakans tersebut pun didukung dengan kemampuan geospasial yang memadai sebagai alat untuk menentukan suatu objek kejadian yang mencakup pada letak, lokasi, posisi, dan faktor geografis. Dalam hal ini, Perdana Menteri Jacinda Ardern dengan gaya kepemimpinannya yang sigap, menjadikan Selandia Baru terus mengintegrasikan seluruh elemen negara untuk menekan laju persebaran Covid-19 sebagai upaya penerapan kebijakan eliminasi non-farmasi. Kedua, Sebagaimana dilibatkannya ilmu pengetahuan dalam pengambilan kebijakan publik, Jacinda Ardern percaya pada perkembangan ilmu pengetahuan sebagai landasan pembuatan kebijakan publik dengan menerapkan kebijakan eliminasi farmasi yakni menerapkan vaksinasi Covid-19 pada seluruh masyarakat Selandia Baru. Sehingga, dengan dukungan kedua faktor tersebut, diterapkannya kebijakan eliminasi mampu menjadikan Selandia Baru berhasil menekan laju persebaran Covid-19.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Operasionalisasi Konsep

1.6.1.1. Integrasi Geospasial Selandia Baru

Pada dasarnya, diperlukannya integrasi informasi geospasial penting adanya untuk melengkapi basis data tata ruang suatu negara. Dalam hal ini, geospasial memiliki

peran untuk menyimpan peta ruang negara, pengolahan basis data, penambahan meta data, pengelolaan dan manajemen data serta menyiapkan data geoportal, dan juga menyimpan data secara keseluruhan. Lebih lanjut, adanya integrasi geospasial juga menjadi struktur ruang susunan pusat pemikiran atas persebaran sarana dan prasarana sebuah negara. Selanjutnya, geospasial juga menjadi sebuah integrasi data mengenai lokasi geografis, dimensi dan ukuran, juga karakteristik objek manusia di permukaan bumi (Ivan et.al., 2020).

Lebih lanjut, data geospasial pun dapat dikolaborasikan dengan konsep geopolitik bahwasannya menjadi integrasi pendekatan untuk mempelajari permasalahan internasional kontemporer yang menganalisa terkait geografi, sejarah, dan budaya suatu negara. Geopolitik mengkonsepsikan sebuah koneksi mendalam antara faktor-faktor geografi dengan negara dan organisasi politik masyarakat. Geopolitik memberikan langkah alternatif bagi analisa fenomena hubungan internasional dan bagaimana fenomena politik internasional terjadi dalam relasinya terhadap geografi. Geopolitik mengekskansi analisisnya melalui lensa-lensa geografi, sosiologi dan antropologi yang memungkinkan analisa yang lebih kaya dibandingkan analisa konvensional baik di tingkat lokal, regional, nasional, dan sistem internasional dan memperkenalkan alternatif teoritis bagi teori-teori hubungan internasional (Granieri, 2015).

Dalam penelitian ini, dengan masuknya Covid-19 di Selandia Baru sebagai negara maritim, menjadikan Selandia Baru cukup mudah dalam mengendalikan persebaran Covid-19 dengan penerapan kebijakan eliminasi non-farmasi dan eliminasi farmasi. Kebijakan eliminasi non-farmasi ini ditetapkan karena letak geografis Selandia Baru yang cukup kebijakans dan jauh dari keramaian mobilitas internasional yang memungkinkan penularan virus lebih kecil dibandingkan negara lain. Selandia Baru memiliki kawasan negara yang cukup luas yakni 268,021 km² dengan kepadatan penduduk 5.192.580 per November 2021. Dengan keluasan wilayah dan ketidak padatan penduduk di Selandia Baru, menjadikan negara ini dengan mudah dapat meminimalkan penyebaran Covid-19 dan diiringi dengan ketepatan penerapan kebijakan eliminasi non-farmasi yakni vaksinasi

Covid-19 untuk seluruh masyarakat Selandia Baru.

1.6.1.2. Peran Perdana Menteri Selandia Baru dalam Menerapkan Kebijakan Eliminasi

Untuk memimpin secara efektif di dunia saat ini, seorang pemimpin perlu meningkatkan pemahaman dan praktek kepemimpinan untuk memenuhi tantangan baru yang dihadapi dari setiap arah di kecepatan arus globalisasi dan berbagai dampak yang ditimbulkan (Armstrong, 2012). Diketahui bahwa, adanya kunci kepemimpinan yang efektif seorang pemimpin harus memiliki pemikiran yang efektif dan inovatif. Seorang pemimpin harus berhasil menempatkan diri pada suatu posisi dan kewajiban institusi. Berfokus pada visi misi dan bekerja secara maksimal dengan tim juga sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang sinergis. Dengan demikian, seorang pemimpin harus pandai dalam mengintegrasikan suatu kebijakan, pun karena diberlakukannya suatu kebijakan, seorang pemimpin dapat dilihat kemampuannya dari berhasil atau tidaknya dari penerapan suatu kebijakan yang ada.

Selama berlangsungnya pandemi Covid-19, seorang pemimpin dituntut untuk dapat memiliki peran yang cukup besar dalam menangani krisis kesehatan global ini. Seorang pemimpin harus belajar dan terus belajar untuk menganalisis suatu permasalahan untuk menemukan solusi yang tepat. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa Perdana Menteri Jacinda Ardern dengan gaya kepemimpinannya yang sigap, menjadikan Selandia Baru mendapatkan pujian dari *World Health Organization* (WHO) atas keberhasilannya dalam menangani persebaran Covid-19 di Selandia Baru. Jacinda Ardern berusaha melibatkan keseluruhan elemen negara sebagai kunci utama dalam melaksanakan kebijakan eliminasi Covid-19 (Wilson, 2020).

Pada Era *Society 5.0* seperti saat ini ditambah lagi dengan kasus pandemi Covid-19, menjadikan kontribusi pemimpin sangat penting. Sebagaimana yang disebutkan oleh Wilson (2020) bahwa agenda utama dalam menyelesaikan

permasalahan adalah kepercayaan publik pada pemimpinnya. Seperti halnya Jacinda Ardern dan Selandia Baru, Jacinda Ardern terus memprovokasi masyarakatnya untuk bersatu melawan Covid-19. Pada kepemimpinan Jacinda Ardern pula, kebijakan penguncian wilayah menjadi pelopor pertama negara-negara lain untuk menerapkan kebijakan larangan masuk orang asing untuk meminimalisir risiko penyebaran Covid-19 di Selandia Baru. Lebih lanjut, pengaruh atas kekuasaan Jacinda Ardern dalam menangani Covid-19 juga dipengaruhi oleh sistem komunikasi pada media massa untuk berpegang teguh pada kebijakan eliminasi seperti menghindari kontak langsung dan menjaga jarak sebagai upaya menekan laju persebaran Covid-19.

Kemudian, konsep ini juga berusaha membangun kepercayaan pada Jacinda Ardern untuk bersama-sama melakukan kontribusi dan mendukung penerapan kebijakan eliminasi Covid-19. Selain itu, untuk meyakinkan masyarakat atas kebijakan yang diambil adalah dengan memberikan tindakan positif seperti mendesak masyarakatnya dengan berkata "bersatu melawan Covid-19 dengan tim lima juta orang" ungkapan tersebut memiliki makna bahwa Jacinda Ardern mengajak seluruh warga negara Selandia Baru untuk bersatu melawan Covid-19. Dari pernyataan tersebut, Jacinda Ardern berhasil memenangkan hati masyarakat Selandia Baru untuk bersama-sama menerapkan kebijakan eliminasi (Mazey & Richardson, 2020). Sehingga, peran kepemimpinan Perdana Menteri Jacinda Ardern menjadi sangat penting untuk memberi intervensi pada masyarakat Selandia Baru dalam menerapkan kebijakan eliminasi Covid-19.

1.6.1.3. Peran Ilmu Pengetahuan sebagai Landasan Pembuatan Kebijakan Eliminasi Covid-19 Selandia Baru

Jagers & Nordblom (2020) menyebutkan bahwa pentingnya kontribusi penelitian dan ilmu pengetahuan dalam pembuatan suatu kebijakan, dikarenakan penelitian dan ilmu pengetahuan berperan sebagai pemberi informasi serta bukti yang dapat digunakan untuk menganalisa suatu permasalahan. Penelitian dan ilmu pengetahuan menjadi bagian penting dalam melakukan penelitian dikarenakan

ilmu pengetahuan berguna untuk membantu untuk merumuskan suatu masalah. Keterlibatan ilmu pengetahuan, pun memiliki dampak yang besar dalam pengambilan kebijakan publik karena pada dasarnya sains memiliki peran penting untuk merencanakan dasar-dasar kebijakan publik.

Kemudian, dalam lingkup pengambilan suatu kebijakan nasional maupun internasional, peran ilmu pengetahuan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang digunakan sebagai aturan normatif yang persuasif. Berbagai aturan ini tidak lain digunakan untuk membantu dalam mengembangkan kerangka kerja dalam menggagas suatu kebijakan sebagai alat untuk menyelesaikan suatu fenomena permasalahan negara. Lebih lanjut, penggunaan ilmu pengetahuan dalam efektifitas esensi proses pembuatan kebijakan publik bermanfaat untuk membingkai studi terkait ilmu pengetahuan dalam kerangka kebijakan publik dengan tujuan untuk memberikan kontribusi formulasi bukti ilmiah yang mempengaruhi produksi kebijakan publik yang memiliki muatan nilai yang efektif dan optimal berbasis bukti (Jagers & Nordblom, 2020).

Seperti halnya di Selandia Baru, Perdana Menteri Jacinda Ardern sangat mempercayai adanya pengembangan ilmu pengetahuan sebagai landasan berpikirnya. Tutukansa (2021) menyebutkan bahwa Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pun selalu berkonsultasi dengan para ilmuwan dalam mengatasi Covid-19 sebelum melakukan pengambilan kebijakan eliminasi farmasi dan non-farmasi. Sejak terkonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada 28 Februari 2020 di Auckland, sejumlah petugas medis telah turun tangan untuk melakukan pelacakan siapa saja yang telah ditemui oleh pasien saat melakukan perjalanan dari Iran menuju Selandia Baru. Sesuai dengan prosedural penanganan Covid-19 yang ada, pemerintah menerapkan kebijakan isolasi diri selama 14 hari dan juga melakukan pembatasan sosialisasi yakni melakukan larangan bepergian. Selain melakukan penguncian wilayah, Selandia Baru juga melakukan pengujian pada 294.048 tes hingga Juni 2020. Pengujian ini juga dibarengi dengan etiket promosi menjaga kebersihan individu hingga lingkungan seperti yang dipaparkan oleh *World Health Organization* (WHO) dalam upaya menekan laju Covid-19.

Kemudian, seiring berkembangnya persebaran Covid-19 di dunia, kebijakan penguncian wilayah tidak cukup untuk menekan laju Covid-19. Laura (2021) menyebutkan bahwa pemilihan kebijakan eliminasi farmasi dengan memanfaatkan kebijakan negara beserta pola hubungan bilateral dengan negara lain, menjadikan Selandia Baru pun mudah untuk menerapkan vaksinasi Covid-19 untuk meminimalisir pandemi Covid-19 yang ada. Vaksinasi dianggap sebagai solusi dari perkembangan Covid-19 karena mampu meningkatkan kekebalan tubuh dari paparan Covid-19. Selain itu, vaksinasi juga bermanfaat untuk mencegah mutasi baru Covid-19 dengan melawan bakteri penyebab infeksi. Meskipun vaksinasi tidak menjamin 100% dalam melindungi seseorang dari Covid-19, setidaknya vaksinasi mampu menekan laju infeksi Covid-19. Dengan demikian, keberhasilan Selandia Baru dalam menangani Covid-19 pun tidak lepas dari berbagai upaya penelitian dan penerapan analisis ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan Selandia Baru dalam menganalisa pola kebijakan yang tepat untuk diterapkan di negaranya sesuai dengan kondisi persebaran Covid-19 di Selandia Baru.

1.6.2. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu, dalam menjelaskan sebuah fenomena, metode ini berusaha menyajikan penjelasan kasus secara cermat dan lengkap juga dilengkapi dengan studi kasus deskriptif (Mahoney & Gary, 2006). Dengan demikian, penelitian ini tidak ditujukan untuk membuat teori baru atau mempersalahkan teori yang ada, melainkan bertujuan untuk menggunakan teori dalam menjelaskan fenomena permasalahan terkait penerapan kebijakan eliminasi Covid-19 di Selandia Baru.

1.6.3. Ruang Lingkup dan Jangkauan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah rentang waktu kepemimpinan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada tahun 2020. Tahun 2020 dipilih

karena pada tahun tersebut Selandia Baru yang dibawah Jacinda Ardern mengalami krisis kesehatan global yakni masuknya pandemi Covid-19 dan Selandia Baru menerapkan kebijakan eliminasi non-farmasi. Lalu, tahun 2021 kebijakan eliminasi farmasi diterapkan dikarenakan masuknya varian baru Covid-19 yakni varian Delta dan varian Omicron yang menjadikan Selandia Baru harus bersikeras lagi dalam menangani Covid-19. Dikarenakan kasus Covid-19 di Selandia Baru masih berlangsung hingga saat ini, maka penelitian ini tidak memiliki batasan akhir penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penelitian ini didapatkan dari dua sumber utama yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer didapat dari dokumen resmi pemerintah, arsip dan laporan, maupun hasil survey yang telah ada sebelumnya yang diterbitkan oleh pemerintah Selandia Baru. Kemudian, sumber sekunder berasal dari jurnal ilmiah, surat kabar dari internet, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian (Mahoney & Gary, 2006). Dengan demikian, penelitian ini dibuat untuk mengetahui respon Selandia Baru dalam menghadapi pandemi Covid-19 sebagai krisis kesehatan global.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Dalam membuktikan hipotesis dan menjawab rumusan masalah, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif. Teknik ini menekankan pada interpretasi penulis terkait dengan sumber data yang didapat (Mahoney & Gary, 2006). Sumber data yang dianalisis adalah mengapa Selandia Baru menerapkan kebijakan eliminasi dalam menekan laju Covid-19 hingga nol kasus. Dari analisis interpretasi tersebut, kemudian dapat disusun hasil penelitian.

1.6.6. Sistematika Penulisan Penelitian

Penelitian ini yang berjudul “*Elimination Strategy: Keberhasilan Selandia Baru dalam Menangani Covid-19*” dibagi ke dalam lima bab.

BAB I	terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, hipotesis, dan metodologi penelitian
BAB II	berisi dari dinamika kondisi Covid-19 di Selandia Baru
BAB III	membahas penerapan kebijakan eliminasi non-farmasi Covid-19 di Selandia Baru
BAB IV	menjabarkan penerapan kebijakan eliminasi farmasi Covid-19 di Selandia Baru
BAB V	kesimpulan dan saran